

EFEKTIVITAS PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENINGKATKAN KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG

Aldi Rizki Permana¹, Masayu Nila Juwita²

^{1,2}Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

Korespondensi: Email :

aldirizkipermana00@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung juga berperan dalam mendukung fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan, hal ini dibuktikan dengan adanya bagian anggaran DPRD Provinsi Lampung yang pemeran pentingnya ialah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas peran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Lampung dan mengetahui aspek pendukung dan aspek penghambat efektivitas peran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Lampung. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran

Sekretariat DPRD sangat efektif dalam meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung hendaknya Sekretariat DPRD mewujudkan reformasi birokrasi melalui perbaikan sistem tatakelola (manajemen) urusan pemerintahan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Aspek pendukung dan aspek penghambat efektivitas peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Lampung adalah fasilitas kerja yang memadai, dan memiliki kultur kerja yang mengedepankan pelayanan yang ramah, berintegritas tinggi, efektif dan efisien dalam pelayanan, bekerja secara profesional dan disiplin, dan bertanggung jawab dalam tugas menjadi faktor pendukung, sedangkan kurang optimalnya koordinasi antar Sekretariat DPRD dengan OPD lainnya dan kompetensi ASN menjadi faktor penghambat peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung.

Keyword : Efektivitas; Peran; Sekretariat DPRD; Kinerja

ABSTRACT

The Lampung Provincial DPRD Secretariat also plays a role in supporting the budget function and also the supervisory function; this is evidenced by the existence of the Lampung Provincial DPRD budget section whose important role is the Lampung Provincial DPRD Secretariat. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the role of the Lampung Provincial DPRD Secretariat in improving the performance of the Lampung Provincial DPRD and to determine the supporting aspects and aspects that inhibit the effectiveness of the role of the Lampung Provincial DPRD Secretariat in improving the performance of the Lampung Provincial DPRD. The type of descriptive research with a qualitative approach, data collection techniques in the study are through interviews, observation and documentation as well as qualitative data analysis. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded

that the Role of the DPRD Secretariat is very effective in improving the performance of the Lampung Provincial DPRD in supporting the implementation of the Lampung Provincial DPRD function. The DPRD Secretariat should realize bureaucratic reform through improving the governance system (management) of government affairs by optimizing the use of information and communication technology. The supporting and inhibiting aspects of the effectiveness of the role of the DPRD Secretariat in improving the performance of the Lampung Provincial DPRD are adequate work facilities, and having a work culture that prioritizes friendly service, high integrity, effective and efficient in service, working professionally and disciplined, and being responsible in carrying out tasks as supporting factors, while the less than optimal coordination between the DPRD Secretariat and other OPDs and ASN competence are inhibiting factors for the role of the DPRD Secretariat in supporting the implementation of the functions of the Lampung Provincial DPRD.

Keywords : *Effectiveness; Role; DPRD Secretariat; Performance.*

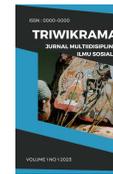
1. PENDAHULUAN

Setiap suatu organisasi membutuhkan pegawai untuk meningkatkan keahlian serta menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tugasnya, dan setiap pegawai dituntut untuk berusaha meningkatkan kualitas serta dapat memahami esensi serta tanggung jawab sesuai dengan profesinya. Kinerja pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Provinsi Lampung.

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung telah diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Lampung merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Lampung. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Lampung, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi Lampung dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah, dan DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah. Namun hingga saat ini pegawai sekretariat belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya, menurut aturan yang telah ditetapkan. Maka dengan demikian keadaan ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pegawai dalam lingkungan kerja DPRD, serta diperlukan bagaimana cara untuk meningkatkan mutu kinerja bagi sekretariat DPRD agar tercapainya tujuan yang sudah disetujui sebelumnya.

Tingginya komitmen pegawai Sekretariat DPRD untuk bekerja secara optimal dalam melayani anggota DPRD merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan layanan Sekretariat



DPRD. Kualitas dan kuantitas pegawai Sekretariat DPRD dan motivasi kerja merupakan hal yang dominan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Setiap organisasi yang ingin maju dan berkembang, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, sebab selain dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya (Septian, 2018).

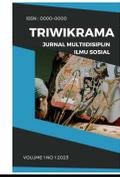
Pada dasarnya DPRD Provinsi Lampung sebagai pembantu serta penunjang atas terselenggaranya kegiatan DPRD Provinsi Lampung. Dalam hal ini DPRD memiliki tiga fungsi pokok yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam pelaksanaan ketiga fungsi ini DPRD Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat DPRD. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam terlaksananya serta tercapainya tujuan dari tiap-tiap fungsi yang ada. Seperti halnya peran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terhadap fungsi legislasi, fungsi legislasi yang terfokus pada perencanaan serta pembentukan produk hukum tentu saja dibantu oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, dengan dibuktikan adanya bagian persidangan dan perundang-undangan, bagian ini memiliki kontribusi penuh pada pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung seperti menyiapkan bahan materi persidangan dalam perumusan produk hukum hingga membantu memberikan tema persidangan itu sendiri.

Selain dari pada mendukung fungsi legislasi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung juga berperan dalam mendukung fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan, hal ini dibuktikan dengan adanya bagian anggaran DPRD Provinsi Lampung yang pemeran pentingnya ialah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Karena dari kelangsungan fungsi anggaran DPRD Provinsi Lampung harus ditunjang juga oleh sumber daya manusia yang paham di bidangnya khususnya oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD akan dimanage terlebih dahulu oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung agar senantiasa tugas dari anggota dewan sedikit terbantu serta tersusun dengan baik. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Peran DPRD Provinsi Lampung sangat diperlukan untuk kemajuan suatu daerah, dalam hal ini fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

Fenomena pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung adalah keterlibatan kerja yang dimiliki para pegawai seperti tidak menganggap pekerjaan adalah hal yang utama, berdampak pada pegawai yang menganggap pekerjaan adalah hal utama dalam diri pegawai karena keterlibatan kerja yang bersifat kelompok membuat pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Lampung cenderung bekerja secara tidak optimal, sehingga dampak negatif munculnya konflik antar pegawai berakibat pada kurang optimalnya pekerjaan di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul: "Efektivitas Peran Sekretariat DPRD Dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Provinsi Lampung".

2. METODE



Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Adapun teknik- teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dilapangan. Teknik ini digunakan untuk mengamati dan melihat proses pelaksanaan pelayanan publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, dilakukan mulai dari awal hingga akhir proses. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mengetahui efektivitas peran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Lampung.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data serta informasi secara mendalam mengenai tingkat kepuasan konsumen pada pelaksanaan pelayanan publik dalam hal efektivitas peran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:24) "dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang." Adapun data yang peneliti peroleh adalah merupakan dari hasil laporan-laporan dan keterangan-keterangan tertulis, tergambar, tercetak maupun terekam yaitu visi-misi, struktur organisasi, jumlah pegawai, kemudian dipilih sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini informan yang disasarkan oleh peneliti tepat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan ialah sebagai berikut :

- 1) Staf TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
- 2) Kasubag Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan oleh peneliti, adalah analisis kualitatif yakin dengan menguraikan data dalam bentuk rumusan kalimat-kalimat, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterprestasikan) bila data itu kualitatif. Dalam melakukan analisis data juga diperlukan teknik pengecekan data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Mulyana, 2017:195). Beberapa tahap yang peneliti lakukan dalam menganalisis data yaitu, Reduksi Data merupakan Data yang diperoleh dari lapangan merupakan data mentah dan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang relevan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting dan diperlukan. Selanjutnya data yang telah dipilih disederhanakan kemudian membuang yang tidak diperlukan. Penyajian Data (*data display*) Data yang telah disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matrik atau bentuk yang mudah dipahami. Penarikan Kesimpulan, setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara rinci, maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau bisa juga disebut sebagai sekretariat DPRD adalah suatu unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD dan pemberian dukungan

terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD sendiri dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional bertanggung jawab atau berada di bawah pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati yang dibina oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD memiliki struktur organisasi yang memudahkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Admosoeparto (2016:55) menyebutkan tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai indikator efektivitas, dari hasil temuan-temuan di lapangan melalui dimensi teori diantaranya: Pencapaian Tujuan; Kualitas Kerja; Kuantitas Kerja; Tepat Waktu; Kepuasan Kerja.

1) Dimensi Pencapaian Tujuan

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan, maka diketahui bahwa pencapaian tujuan dapat dinilai dari produktivitas Sekretariat DPRD dalam membantu tugas Anggota DPRD Provinsi Lampung tercermin dari efektivitas pekerjaan yang dilakukan, dimana setiap pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Para pegawai memahami bahwasanya merekabekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Anggota DPRD Provinsi Lampung.

2) Dimensi Kualitas Kerja

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan, maka diketahui bahwa Kualitas kerja Sekretariat DPRD dalam membantu tugas Anggota DPRD Provinsi Lampung dapat dinilai dari sejauhmana hasil kerja, dimana Hasil kerja yang dilakukan pegawai Sekretariat DPRD tersebut dapat dipertanggungjawabkan mencerminkan kinerja mereka yang baik.

3) Dimensi Kuantitas Kerja

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan, maka diketahui bahwa kuantitas kerja dapat diukur dari responsivitas Sekretariat DPRD dalam membantu tugas Anggota DPRD Provinsi Lampung diantaranya tercermin dari banyaknya hasil kerja dari Sekretariat DPRD dalam merespons keluhan dari para anggota DPRD Provinsi Lampung.

4) Dimensi Tepat Waktu

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan, maka diketahui bahwa Ketepatan waktu dapat dilihat dari akuntabilitas layanan Sekretariat DPRD dalam membantu tugas Anggota DPRD Provinsi Lampung juga dapat dinilai dari sejauhmana pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan Anggota DPRD Provinsi Lampung tepat sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati.

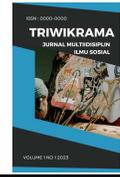
5) Dimensi Kepuasan Kerja

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan, maka diketahui bahwa kepuasan kerja Sekretariat DPRD dalam membantu tugas Anggota DPRD Provinsi Lampung juga dapat dinilai dari persyaratan administrasi sesuai dengan tatanan administrasi serta mempunyai loyalitas terhadap instansi tempat bekerja.

Aspek Pendukung dan Aspek Penghambat

1) Aspek Pendukung

Menurut Husnan dalam Wahyuni (2014) mendefinisikan fasilitas kerja sebagai prasarana dan sarana yang diperlukan untuk membantu karyawan agar lebih mudah menyelesaikan pekerjaan guna meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil analisis penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam hal kesediaan data dan informasi yang dibutuhkan anggota DPRD Provinsi Lampung seperti data atau



informasi anggaran, program dan kegiatan baik itu yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sudah cukup baik dan secara serta merta bisa dipenuhi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

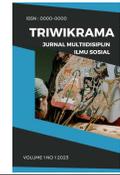
Budaya kerja atau kultur kerja merupakan hasil kreativitas, rasa, dan prakarsa individu yang dikembangkan dalam suatu organisasi dalam rangka menyelaraskan sikap, perilaku, dan kegiatan yang berlangsung dalam suatu organisasi (lingkungan kerja), agar tercipta suatu tatanan yang mengakar (positif) suasana di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil analisis penelitian menemukan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Lampung memiliki kultur kerja yang mengedepankan pelayanan yang ramah, berintegritas tinggi, efektif dan efisien dalam pelayanan, bekerja secara profesional dan disiplin, dan bertanggung jawab dalam tugas. Menurut Mangkunegara (2015), budaya kerja adalah suatu sistem keyakinan, nilai, dan standar yang telah terbentuk dalam suatu organisasi dan dapat digunakan sebagai landasan perilaku anggota dalam rangka memecahkan masalah dengan adaptasi eksternal dan integrasi internal.

2) Aspek Penghambat

Dalam suatu organisasi, koordinasi adalah suatu pengaturan aktif, bukan pasif yang di dalamnya dibuat aturan-aturan mengenai segala gerak, kegiatan, dan kinerja antara atasan dan bawahan yang mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang yang saling berhubungan. Pengaturan ini dibuat untuk menghindari kebingungan dan duplikasi usaha, yang dapat membuang waktu dan sumber daya dan berdampak negatif pada moral dan ketertiban kerja. Temuan analisis penelitian menunjukkan bahwa masih kurang optimalnya koordinasi antar Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dengan OPD lainnya apabila ada proses pembahasan suatu rancangan peraturan atau anggaran yang akan berdampak pada pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung. Menurut Handoko (2016), koordinasi adalah proses penggabungan tujuan dan kegiatan di beberapa departemen atau area fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Peneliti menemukan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi daerah dan kemampuan para pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam hal fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi. "Unsur personal/individu yang dimiliki setiap pegawai yang menjadi faktor penghambat antara lain wawasan, kompetensi, motivasi, dan dedikasi. Jelas dari kutipan wawancara diatas, bahwa selain faktor koordinasi dan kompetensi yang masih kurang optimal, juga terdapat faktor motivasi dan dedikasi dari setiap pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam membantu pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung yang masih rendah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa fasilitas kantor yang memadai adalah faktor pendukung peran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan fungsinya. Kemudian komponen pendukung tersebut menjadi pendukung utama dalam suatu tugas, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pekerjaan yang diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, tepat, dan lebih baik. seperti perabot kantor, interior, dan tata ruang kantor; mesin komunikasi kantor seperti telepon, interkom, faksimile; komputer, laptop, tik dan mesin fotocopy. Tersedianya fasilitas kantor yang cukup dan berkualitas tinggi sangat penting bagi setiap organisasi untuk menjalankan operasinya dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, faktor pendukung lain yang ditemukan dalam mendukung peran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsinya adalah kultur kerja yang



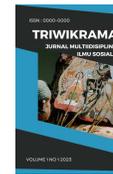
mengutamakan pelayanan yang ramah, berintegritas tinggi, efektif dan efisien, bekerja secara profesional dan disiplin, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.

Salah satu faktor yang menghambat peran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung adalah jumlah pegawai atau sumber daya manusia yang kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kurangnya sumber daya manusia ini berdampak negatif pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Lampung memiliki 60 (enam puluh) Pegawai Negeri Sipil, dengan 28 (dua puluh delapan) orang diantaranya merupakan lulusan SLTA, 22 (dua puluh dua) orang dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) yang terdiri atas berbagai disiplin ilmu, dan sisanya memiliki tingkat pendidikan Magister (S2), Diploma serta SMP. Begitu juga dengan Pegawai Non PNS (PTT/Tenaga Kontrak) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan latar belakang pendidikan setingkat SLTA sebanyak 40 (empat puluh) orang yang sebagian besar menjalankan fungsi sebagai tenaga kebersihan dan lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 3 (tiga) orang. Hal ini menunjukkan dari segi kuantitas dan kualitas sangat kurang yang mengakibatkan pegawai yang ada harus merangkap pekerjaan yang harus dilaksanakan karena Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah besar yang terhimpun dari berbagai bidang kerja seperti tata usaha, pengelolaan keuangan, dan pembantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari 30 (tiga puluh) anggota DPRD.

Setiap lembaga pemerintah diciptakan dengan tujuan tertentu, dan jika tujuan tersebut terpenuhi, lembaga tersebut dapat dianggap berhasil. Kompetensi menjadi dasar yang kuat yang diperlukan untuk sukses. Setiap prosedur yang melibatkan sumber daya manusia membutuhkan kompetensi. Kinerja meningkat karena lebih banyak kompetensi diperhitungkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti ditemukan bahwa kompetensi ASN yang menjadi faktor penghambat peranan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung. Karena pegawai negeri sipil dianggap sebagai bagian dari aparatur negara dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam melaksanakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Kompetensi memiliki pengertian yang sama dengan capability (kemampuan). Seseorang yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Peran Sekretariat DPRD efektif dalam meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung, hal tersebut dibuktikan dengan Sekretariat DPRD yang mampu mewujudkan reformasi birokrasi melalui perbaikan sistem tatakelola (manajemen) urusan pemerintahan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif baik itu dilingkungan organisasi antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD Provinsi Lampung maupun dengan OPD lainnya, serta perlu adanya program dan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi ASN, seperti melakukan reformasi birokrasi, berbagai diklat dalam jabatan, diklat fungsional, diklat teknis, workshop, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya. Aspek pendukung efektivitas peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Lampung



adalah fasilitas kerja yang memadai, dan memiliki kultur kerja yang mengedepankan pelayanan yang ramah, berintegritas tinggi, efektif dan efisien dalam pelayanan, bekerja secara profesional dan disiplin, dan bertanggung jawab dalam tugas menjadi faktor pendukung. Sedangkan kurang optimalnya koordinasi antar Sekretariat DPRD dengan OPD lainnya dan kompetensi ASN menjadi faktor penghambat peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung serta kurang tepatnya waktu dalam penyelesaian pekerjaan oleh Sekretariat DPRD.

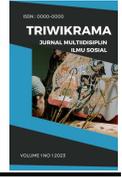
5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Khususnya kepada informan yang sudah meluangkan waktunya untuk penulis.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirdjo. (2015). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chandra (2016). *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Farida. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia 1*. Ponorogo: FE Universitas Muhammadiyah.
- Gulo. (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harsuko. (2017). *Mendongkrak Motivasi dan Kinerja: Pendekatan Pemberdayaan SDM*. Malang: UB Press.
- Hasibuan. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda (2018), *Dampak Limbah dan Polusi terhadap Manusia dan Lingkungan*, Makassar: Alauddin University Press.
- Iskandar. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Kuncoro. (2019). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mangkunegara. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo (2017), *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Pustaka
- Mathis dan Jackson. (2017). *Human Resource Management Edisi 10 Jilid 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moeheriono. (2017). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Nurrohman (2017), *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinambela. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prananda Media Group.
- Tchobanoglous et. al. (2013), *Integrated Solid Waste Management Engineering Principles and Management Issues*, Singapore: Mc Graw Hill.Inc.
- Winardi dalam Bayu (2017), *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*, Jakarta: Mandar Maju.



B. Jurnal

- Dwiarti dan Wibowo. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Taman Wisata Candi Prambanan. *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis (JPSB)*, 157–170.
- Gomes. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Loyalitas Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan di CV Hartono Flash Surabaya. *AGORA Vol.5. No.3.*, 26-28.
- Maharjan. (2017). Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi. *Jurnal Universitas Udaya Bali*, 56-57.
- Rivai dan Basri. (2016). *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Grafindo.